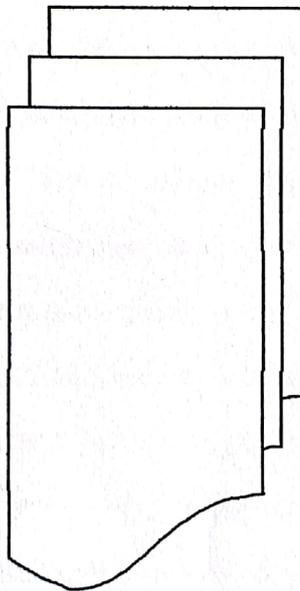




# RENCANA KERJA TAHUN 2022



**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN FLORES TIMUR**

**Jln. T.M.P Lapaktana No. 5 Telp. (0383) 21151,**

**Fax (0383) 21453 Kode Pos 86218**

**e-mail : [diskopukm\\_flotim@yahoo.com](mailto:diskopukm_flotim@yahoo.com)**

**LARANTUKA**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Kuasa bahwa Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 telah selesai disusun yang merupakan amanat undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Pasal 21 ayat 3 menyebutkan bahwa : “Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4)”.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Renstra Perubahan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur dalam aspek perencanaan pembangunan daerah, yang memuat Kebijakan, Program-Program dan Kegiatan indikatif Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur.

Tersusunnya Rencana Kerja ini tidak terlepas dari partisipasi semua pihak yang ada di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur, besar harapan kami agar RENJA ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur dan yang memerlukannya, untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi penentu kebijakan,serta selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, amiin.

Larantuka, 01 Oktober 2021

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah  
Kabupaten Flores Timur,





DAFTAR ISI

Halaman

Kata pengantar .....	i
Daftar isi .....	ii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Maksud dan Tujuan .....	4
1.5 Sistematika Penulisan.....	4
<b>BAB. II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b>	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	5
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	12
2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	14
2.4 Review Terhadap Rancangan Renja.....	15
2.5 Penelaahan Terhadap Usulan Masyarakat .....	23
<b>BAB. III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	24
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja perangkat Daerah.....	26
3.3 Program dan Kegiatan .....	28



BAB. IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....32

BAB. V. PENUTUP .....41



**BAB I**

**PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

## 1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD), adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja OPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansi menerjemahkan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD);
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA-PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2022; dan
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah.  
Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor



- 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- Persyaratan penyusunan RAPBD melalui tahap sebagai berikut :
1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPPD tahun berkenaan;
  2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana yang tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan;
  3. Program dan kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
  4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju.

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan



6. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2022.

### 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022, bertujuan untuk menunjukkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dari berbagai kegiatan, serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya pembangunan daerah.

Rencana Kerja disusun sebagai pedoman bagi :

1. Pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur;
2. Penyusunan kebijakan anggaran, program dan kegiatan Tahun 2022

### 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur tahun 2022 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan



## BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ( Tabel TC.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renja Perangkat Daerah )
- 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  
( Tabel TC.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah : Capaian SPM / Standar Nasional dan IKK )
- 2.3 Isu – isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Renja  
( Tabel TC.31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021 )
- 2.5 Penelaahan terhadap Usulan Masyarakat ( Tabel TC.32 )

## BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

( Tabel TC.33 Perumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2022 dan Perkiraan Maju tahun 2023 )

## BAB IV PENUTUP



**BAB II**

**EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA  
DINAS KOPERASI  
USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN  
FLORES TIMUR TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra  
Perangkat Daerah  
( Tabel TC. 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renja Perangkat Daerah )
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  
( Tabel TC. 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah : capaian Capaian SPM/ Standar Nasional da IKK )
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Renja  
( Tabel TC. 31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 )
- 2.5 Penelaahan Terhadap Usulan Masyarakat ( Tabel TC. 32 )

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep Value for Money. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut

:

- a. Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk



melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.

- b. Indikator Keluaran (Output), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.
- c. Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Hasil evaluasi periode pelaksanaan tahun 2020 Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut :

DATA LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BELANJA MENURUT JENIS BELANJA

PADA DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN FLORES TIMUR

POSISI 31 DESEMBER 2020

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	JUMLAH BELANJA (Rp)	JENIS BELANJA									%	SISA ANGGARAN		
				PEGAWAI			BARANG DAN JASA			MODAL		TOTAL				
				Jumlah	REALISASI		Jumlah	REALISASI		Jumlah	REALISASI				REALISASI	
					KEU (Rp)	FISIK (%)		KEU (Rp)	FISIK (%)		KEU (Rp)	FISIK (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	BELANJA		3.590.187.767											3.474.056.547	96,77	116.131.220,00
1.1 5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		3.590.187.767											3.474.056.547	96,77	116.131.220,00
	BELANJA TIDAK LANGSUNG		1.927.528.944											1.856.379.108	96,31	71.149.836
	BELANJA LANGSUNG		1.662.658.823	552.531.900			1.110.126.923	-						1.617.677.439	97,29	44.981.384
2 11	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		784.864.139	465.150.000	462.000.000	99,32	319.714.139	316.790.580						778.790.580	99,23	6.073.559



RENCANA KERJA (RENJA)  
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN FLORES TIMUR

2022

2	11	2	1	0	0	0	0	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Larant uka	2.200.000					2.200.000	2.180.500	99,11	-	-	-	2.180.500	99,11	19.500	
2	11	2	1	0	0	0	0	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Larant uka	25.754.000					25.754.000	23.926.210	92,90	-	-	-	23.926.210	92,90	1.827.780	
2	11	2	1	0	0	0	0	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Larant uka	2.993.000					2.993.000	2.488.220	83,13	-	-	-	2.488.220	83,13	504.780	
2	11	2	1	0	0	0	0	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Larant uka	54.600.000	54.600.000	52.600.000	96,34	-	-	-	-	-	-	-	-	52.600.000	96,34	2.000.000
2	11	2	1	0	0	0	0	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Larant uka	9.224.300		-	-	-	9.224.300	9.224.000	100,00	-	-	-	9.224.000	100	300	
2	11	2	1	0	0	0	1	0	Penyediaan alat tulis kantor	Larant uka	29.220.700		-	-	-	29.220.700	29.220.700	100,00	-	-	-	29.220.700	100	-	
2	11	2	1	0	0	0	1	1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Larant uka	42.867.200		-	-	-	42.867.200	42.866.950	100,00	-	-	-	42.866.950	100	250	
2	11	2	1	0	0	0	1	2	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Larant uka	21.508.439		-	-	-	21.508.439	21.508.000	100,00	-	-	-	21.508.000	100	439	
2	11	2	1	0	0	0	1	5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Larant uka	2.000.000		-	-	-	2.000.000	1.500.000	75,00	-	-	-	1.500.000	75	500.000	
2	11	2	1	0	0	0	1	7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Larant uka	11.460.000		-	-	-	11.460.000	11.451.000	99,92	-	-	-	11.451.000	99,92	9.000	



RENCANA KERJA (RENJA)  
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN FLORES TIMUR

2022

2	11	2	1	0	0	1	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Kupang, Jkta	172.486.500	-	-	-	172.486.500	172.425.000	99,96	-	-	-	172.425.000	99,96	61.500
2	11	2	1	0	0	2	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran	Larantuka	410.550.000	410.550.000	409.400.000	99,72	-	-	-	-	-	-	409.400.000	99,72	1.150.000
2	11	2	1	0	0		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		43.626.470	-	-	-	43.626.470	43.598.259	99,94	-	-	-	43.598.259	99,94	28.211
2	11	2	1	0	0	0	Pengadaan Perlatan Gedung Kantor	Larantuka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	11	2	1	0	0	2	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Larantuka	15.148.900	-	-	-	15.148.900	15.145.000	99,97	-	-	-	15.145.000	99,97	3.900
2	11	2	1	0	0	2	Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaran dinas / Operasional		25.507.570	-	-	-	25.507.570	25.498.259	99,96	-	-	-	25.498.259	99,96	9.311
2	11	2	1	0	0	2	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Larantuka	2.970.000	-	-	-	2.970.000	2.955.000	99,49	-	-	-	2.955.000	99,49	15.000



2	11	2	1	0	0	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		36.410.000	36.410.000	36.301.000	99,70	-	-	-	36.301.000	99,70	109.000	
2	11	2	1	0	0	0	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Larantuka	36.410.000	36.410.000	36.301.000	99,70	-	-	-	36.301.000	99,70	109.000	
		2	1	0	1		Program penciptaan iklim Usaha kecil menengah yang Kondusif		257.761.513				257.761.513	249.061.000	96,62	-	249.061.000	96,62	8.700.513
2	11	2	1	0	1	0	Fasilitasi Pengembangan UKM	19 Kec.	217.880.513	-	-	-	217.880.513	209.210.000	96,02	-	209.210.000	96,02	8.670.513
2	11	2	1	0	1	1	Monotoring, evaluasi dan pelaporan	19 Kec.	39.881.000				39.881.000	39.851.000	99,92	-	39.851.000	99,92	30.000
		2	1	0	1	6	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		471.782.000	46.761.900	46.755.000	99,99	425.020.100	395.407.100	93,03	-	442.162.100	93,72	29.619.900





## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara keseluruhan pencapaian kinerja berhasil dicapai dengan persentase capaian realisasi anggaran sebesar 96,77%. Di lihat dari trendnya pencapaian kinerja sektor koperasi, usaha mikro dan wirausaha pemula/wirausaha baru, menunjukkan trend perkembangan yang baik. Namun, masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi sebagaimana tercermin pada beberapa indikator kinerja utama yang belum tercapai sesuai target, antara lain peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengurus koperasi dan pelaku usaha mikro dalam pengelolaan koperasi dan usaha.

Adapun masalah dan upaya Pemecahan Masalah dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Koperasi Usaha kecil dan Menengah antara lain :

### a. Masalah dan Kendala yang dihadapi

Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan sejauh ini cukup signifikan namun demikian masih dijumpai beberapa kendala dan permasalahan dalam pemberdayaan koperasi UMKM sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kualitas SDM Koperasi UMKM yang berakibat rendahnya peroduktivitas koperasi UMKM.
2. Masih rendahnya akses pasar dan pangsa pasar yang dikuasai oleh koperasi UKM
3. Terbatasnya modal yang dimiliki oleh koperasi UMKM. Dan lemahnya akses permodalan Koperasi UMKM ke perbankan karena tidak tersedianya angunan sebagai persyaratan untuk memperoleh kredit dari pihak perbankan.
4. Adanya Persaingan antara koperasi

Pesaing merupakan hal yang tidak dapat kita elakkan lagi tetapi kita harus tau bagaimana menyikapinya. Bila kita tidak peka terhadap lingkungan (pesaing) maka mau tidak mau kita akan tersingkir. Bila kita tahu bagaimana menyikapinya maka koperasi akan surface dan dapat berkembang. Dalam menanggapi pesaing kita harus mempunyai trik – trik khusus, trik – trik/ langkah khusus tersebut dapat kita lakukan dengan cara melalui harga barang/jasa, sistem kredit dan pelayanan yang maksimum. Mungkin koperasi sulit untuk bermain dalam harga, tapi hal ini dapat kita lakukan dengan cara sistem kredit, yang pembayarannya dapat dilakukan dalam waktu mingguan ataupun



bulanan tergantung perjanjian. Dengan adanya hal seperti ini diharapkan dapat menarik perhatian masyarakat untuk menjadi anggota.

#### 5. Budaya Kerja

Kerja keras dan disiplin bangsa Indonesia yang jauh dari harapan, sehingga koperasi akan sulit untuk berkembang apalagi untuk maju. Untuk itu dalam menetapkan pengurus koperasi harus diseleksi dengan baik agar nantinya dalam perjalanannya tidak ada pengurus yang makan gaji buta tanpa mau bekerja. Selain itu hendaknya dilakukan atau diberikan pelatihan atau bimbingan kepada seluruh pengurus dan anggota agar mereka sadar bahwa ini adalah koperasi mereka harus mau untuk bekerja keras guna kemajuankoperasitersebut.

#### b. Upaya Pemecahan Masalah

Upaya pemecahan masalah yang telah dilaksanakan untuk mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pembinaan koperasi usaha kecil dan menengah adalah sebagai berikut :

1. Memberikan dorongan kepada koperasi untuk melaksanakan rapat anggota Tahunan (RAT). Hal ini penting karena penilaian Koperasi Berkualitas dilaksanakan terhadap koperasi yang telah melaksanakan RAT dan melaksanakan pembenahan terhadap koperasi tidak aktif melalui fasilitas penggabungan maupun pembubaran koperasi, melalui fasilitasi perubahan anggaran dasar koperasi mencakup pengalihan Badan Hukum (BH) Kepada Ekonomis produktif pra koperasi.
2. Memfasilitasi kegiatan legal aspek kepada usaha mikro kecil dan koperasi untuk memudahkan dalam mengakses permodalan dan pengembangan usahanya.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Koperasi UMKM melalui berbagai pendidikan dan latihan, sosialisasi dan penyuluhan sehingga mereka mampu mengelola kelembagaan koperasi UMKM dan mampu meningkatkan kegiatan usahanya.
4. Dukungan peralatan usaha bagi wirausaha Baru paska diklat sebagai langkah memperluas akses pasar bagi wirausaha baru yang tergabung dalam koperasi dan wirausaha baru yang tersebar di Kabupaten Flores Timur.
5. Melaksanakan pola kemitraan dengan BUMN melalui kerjasama peningkatan kapasitas SDM Koperasi dan UKM dibidang wirausaha.



6. Meningkatkan profesionalisme aparat Pembina melalui berbagai pendidikan dan latihan teknis, pelatihan / kursus keterampilan lain-lain sehingga dapat menambah pengetahuan, kemampuan dan wawasan dan melaksanakan pembinaan terhadap koperasi UMKM
7. Meningkatkan permodalan koperasi UMKM serta meningkatkan akses permodalan ke perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Upaya yang dilakukan antara lain memberikan dukungan perkuatan berupa bantuan Modal kerja (pola bergulir maupun dana hibah) kepada koperasi UMKM serta memfasilitasi akses permodalan ke Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya
8. Untuk meningkatkan akses koperasi dan UMKM terhadap sumber – sumber permodalan khususnya dari lembaga perbankan, maka telah dilaksanakan sosialisasi kredit usaha rakyat.
9. Memfasilitasi program sertifikasi hak atas tanah dan perijinan untuk UKM sehingga UKM memiliki agunan yang diperlukan untuk mengajukan kredit ke perbankan.
10. Meningkatkan akses pasar dan pangsa pasar koperasi UMKM. Upaya yang dilaksanakan adalah memfasilitasi penyelenggaraan promosi/pameran di berbagai event baik tingkat lokal. Regional maupun nasional. disamping itu juga melaksanakan kegiatan Temu Usaha dan Pasar Rakyat.
11. Memfasilitasi KUKM terhadap program-program dari kementerian koeprasi antara lain penataan PKL, Pembangunan Pasar Tradisional dan Dukungan peralatan untuk kegiatan produksi.
12. Melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengawasan dengan instansi terkait, Bank, BUMN dan Lembaga lainnya.

### 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD

#### - Sumber daya manusia;

Sumber daya manusia aparat pembina yang ada masih belum cukup mampu melatih sehingga masih perlu mendatangkan pelatih dari luar, kuantitas aparat pembina masih belum cukup untuk melatih dibandingkan dengan jumlah koperasi dan usaha mikro yang ada dan sumber daya manusia pengurus koperasi masih relatif rendah.



- Sarana dan pra sarana

Sarana penunjang untuk melakukan pendampingan masih terbatas.

- Anggaran;

Alokasi dana masih perlu ditambah karena pembina, pengurus / anggota koperasi dan usaha mikro masih cukup banyak yang belum dilatih dan perlunya pendampingan secara kontinyu/ berkesinambungan kepada mereka yang telah dilatih, agar dapat menerapkan ilmu yang telah di dapat dari kegiatan diklat/ bimtek dalam menjalankan usahanya.

#### 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada tabel 2.4. berikut :



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra OPD		Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi
							Target	Rp.	Target	Rp.		
Mengembangkan Birokrasi yang Semakin Profesional dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah OPD yang memiliki SOP		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran			780.109.339			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	OPD
				Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya kebutuhan jasa surat menyurat		12 Bulan	3.400.000	12 Bulan	3.740.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
				Penyediaan jasa sumber daya air dan listrik	Tersedianya sarana Komunikasi, Air dan Listrik		12 Bulan	31.750.000	12 Bulan	34.925.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	



				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pemeliharaan perijinan kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	5.000.000	12 Bulan	5.500.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 Bulan	54.655.650	12 Bulan	60.121.215	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 Bulan	2.887.600	12 Bulan	3.176.360	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	12 Bulan	22.781.800	12 Bulan	25.059.980	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kebutuhan cetak dan penggandaan	12 Bulan	33.275.200	12 Bulan	36.602.720	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	12 Bulan	21.508.439	12 Bulan	23.659.283	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	3.500.000	12 Bulan	3.850.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



				Penyediaan makanan dan minuman	Tersediaya kebutuhan makanan dan minuman	12 Bulan	5.550.000	12 Bulan	6.105.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Terlaksananya kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12 Bulan	181.745.000	12 Bulan	199.919.500	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
				Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran	Tersedianya jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran	12 Bulan	414.055.650	12 Bulan	455.461.215	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah OPD yang memiliki SOP		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana Prasarana Aparatur		63.967.600			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	OPD
				Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	12 Bulan	30.000.000	12 Bulan	33.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	12 Bulan	11.958.400	12 Bulan	13.154.240	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	



				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional		12 Bulan	16.609.200	12 Bulan	18.270.120	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor		12 Bulan	5.400.000	12 Bulan	5.940.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
				<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Terwujudnya dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan</b>			<b>34.575.000</b>		<b>38.032.500</b>	<b>Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>	<b>OPD</b>
				Penyusunan laporan capaian kinerja, realisasi keuangan dan laporan tahunan	Tersedianya jasa penyusunan laporan		7 dokumen	34.575.000	7 dokumen	38.032.500	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
				<b>Program Penciptaan Iklim UKM yang Kondusif</b>	<b>Jumlah UKM/LKM</b>	<b>174 UMKM dari 2512 UMKM</b>	<b>105</b>	<b>523.126.500</b>	<b>625</b>	<b>575.439.150</b>	<b>Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>	<b>19 kecamatan</b>



				Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah	Jumlah UMKM yang difasilitasi	50 UMKM	55	454.365.500	325 UMKM	499.802.050	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
				Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah KUMKM sasaran	50 UMKM	50	68.761.000	300 UMKM	75.637.100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
				<b>Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM</b>	<b>UMKM dan koperasi yang diperkuat sistem pemasaran</b>	<b>30 UMKM</b>	<b>500</b>	<b>835.927.311</b>	<b>2500 Wirausaha baru/ Wirausaha pemula</b>	<b>919.520.043</b>	<b>Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>	<b>19 kecamatan</b>
				Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	UMKM yang dilatih	60 UMKM	1 kali	153.714.461	150 UMKM	169.085.908	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
				Pelatihan pengelolaan manajemen koperasi/KUD	Jumlah KUKM yang dilatih	194 koperasi	3 kali	417.358.000	194 koperasi	459.093.800	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
				Pembinaan dan pendampingan wirausaha pemula pasca pelatihan	Jumlah wirausaha pemula yang didampingi	300 wirausaha pemula	19 kecamatan	54.652.500	1500 Wirausaha pemula	60.117.750	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
				Identifikasi dan pengembangan motivasi wirausaha pemula/wirausaha baru	Jumlah wirausaha pemula / wirausaha baru	500 wirausaha baru/ wirausaha pemula	500 wp/wb	210.202.350	2500 Wirausaha baru/ Wirausaha pemula	231.222.585	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	



				<b>Program Peningkatan Kelembagaan Koperasi</b>	<b>Jumlah koperasi yg aktif</b>	<b>154 dari 180 koperasi</b>	<b>5</b>	<b>359.896.050</b>	<b>30 Koperasi</b>	<b>395.885.655</b>	<b>Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>	<b>19 kecamatan</b>
				Sosialisasi Prinsip - Prinsip Pemahaman Perkoperasian		15 kelompok	10 kelompok	214.638.050	80 kelompok	236.101.855	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
				Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi		10 koperasi	10 kelompok	20.044.500	50 koperasi	22.048.950	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
				Penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan Koperasi		61 Koperasi aktif	84 koperasi berbadan hukum	54.780.000	61 koperasi aktif	60.258.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	



				Pembinaan, Pengawasan KSP dan KJKS	Jumlah koperasi yang diawasi/ diperiksa	65 Koperasi aktif	48 koperasi berbadan hukum	70.433.500	65 koperasi aktif	77.476.850	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
--	--	--	--	--	---	----------------------	-------------------------------------	------------	-------------------------	------------	--

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kabupaten Flores Timur,

Achmad R. Duni, SE

Perbina Utama Muda

NIP. 19650516 199203 1 008



## 2.6 Penelaahan Terhadap Usulan Masyarakat

Usulan usulan masyarakat pada Program dan Kegiatan yang didanai oleh APBD II melalui Musrenbang Tingkat Kecamatan terlebih dahulu diklarifikasi oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur dan Apabila sesuai dengan program kegiatan yang ada maka akan diakomodir sesuai kebutuhan dan skala prioritas daerah. dan selanjutnya terhadap usulan kegiatan yang tidak dapat diakomodir pada APBD II, akan didorong melalui dana APBD I dan APBN.



**BAB III**

**TUJUAN , SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 1.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 1.3 Program dan kegiatan

### 3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2022, ditetapkan arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2022 adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural melalui pemulihan daya beli dan usaha, diversifikasi ekonomi yang didukung dengan reformasi iklim investasi, reformasi kelembagaan, serta reformasi peningkatan kualitas SDM dan perlindungan social, berikut arah kebijakan RKP tahun 2022 :

1. Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural
2. Diversifikasi Ekonomi
3. Pemulihan daya beli dan usaha
4. Reformasi perlindungan Sosial
5. Reformasi Peningkatan Kualitas SDM
6. Reformasi Iklim Investasi
7. Reformasi Kelembagaan

Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan, disusun sepuluh strategi pembangunan, yakni (1) meningkatkan nilai tambah sektor industri, (2) mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata, (3) meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, (4) meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi nasional, (5) meningkatkan pemerataan infrastruktur, (6) meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital, (7) meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK), (8) mempercepat reformasi perlindungan sosial, (9) RENCANA KERJA DINAS KOPERASI & UKM TAHUN 2022 54 meningkatkan kualitas SDM dan inovasi, serta (10) memperkuat sistem kesehatan nasional dan penanganan Covid-19.



Berdasarkan Rancangan RKP tahun 2022 kebijakan nasional sektor Koperasi, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi Nasional
2. Perhatian khusus pada usaha mikro kecil dengan program Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
3. Penyediaan sarana prasarana pendukung kegiatan ekonomi dengan program Pasar Rakyat yang dikelola Koperasi termasuk di daerah tertinggal dan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT).
4. Pengembangan Kewirausahaan melalui program Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan, Perkoperasian, Keterampilan Teknis dan Manajerial.

Berkaitan dengan Kebijakan Nasional di sektor Koperasi, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur dalam penyusunan program kegiatan tahun 2022 telah selaras dengan kebijakan nasional tersebut. Program yang telah dilaksanakan dan yang akan direncanakan di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur yang sesuai dengan program kerja Nasional adalah program Pengembangan Kewirausahaan melalui program Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan melalui pendidikan dan pelatihan bagi koperasi, pelatihan kewirausahaan, pelatihan manajerial bagi pengurus koperasi dan pelatihan ketrampilan teknis bagi pelaku koperasi. Dana Alokasi Khusus ( DAK Non Fisik )

Renja Kerja Usaha TAHUN 2022 bertujuan membantu Koperasi, Usaha Mikro kecil dalam memperoleh akses pembiayaan dan Meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi Nasional. Dalam hal ini dapat mendorong terwujudnya kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha dan koperasi.

Kebijakan nasional penyediaan sarana prasarana pendukung kegiatan ekonomi, dalam hal ini revitalisasi pasar dan PLUT merupakan kegiatan yang sangat penting bagi pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil di Kabupaten Flores Timur, akan tetapi menimbang kondisi fiskal Kabupaten Flores Timur pada saat ini, kebijakan tersebut masih belum memungkinkan untuk dilaksanakan. Berdasarkan kondisi tersebut diatas sangat diharapkan



dukungan pendanaan dari pusat melalui DAK agar kegiatan revitalisasi pasar dan PLUT dapat diwujudkan di Kabupaten Flores Timur.

### 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran jangka menengah daerah beserta indikator kinerjanya dapat disajikan dalam tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1  
Tujuan dan sasaran jangka menengah  
pelayanan Perangkat Daerah

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target kinerja sasaran pada tahun				
					2018	2019	2020	2021	2022
1.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia koperasi dan usaha kecil dan menengah.	Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pengurus koperasi, usaha kecil dan menengah (KUMKM) yang terampil dan handal melalui pembinaan dan pelayanan dalam pengelolaan koperasi, pemanfaatan teknologi serta berwirausaha.	- Termotivasi orang muda dalam berwirausaha melalui peningkatan sumber daya manusia 2500 (dua ribu lima ratus) orang muda yang mengikuti kegiatan identifikasi dan pengembangan motivasi wirausaha pemula / wirausaha baru ;	1. Meningkatkan jumlah orang muda yang mengikuti kegiatan.	500	1000	1500	2000	2500
				2. Meningkatkan jumlah koperasi aktif.	30	60	90	120	150
				3. Meningkatkan jumlah pengurus peserta diklat perkoperasian	80	160	240	320	400
				4. Meningkatkan produktivitas koperasi	50	100	150	200	250
				5. Meningkatkan jumlah usaha mikro penerima dana bergulir.	10	20	30	40	50
				6. Meningkatkan jumlah koperasi baru berbadan hukum.	5	10	15	20	25
				7. Meningkatkan jumlah	50	100	150	200	250
2.	Meningkatkan motivasi dan produktivitas usaha koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatkan produktivitas dan daya saing KUMKM agar menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya.  Mengembangkan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan usaha KUMKM terutama akses terhadap sumber	- Terwujudnya peningkatan 150 (seratus lima puluh) koperasi aktif;  - Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia pengurus koperasi dan usaha mikro						



3.	Mengembangkan lingkungan usaha yang kondusif bagi aksesibilitas koperasi dan usaha mikro terhadap sumber-sumber permodalan.	daya pembiayaan dan permodalan.  Mewujudkan koperasi dan usaha mikro berkualitas	yang berdaya saing, terampil dan mandiri dalam pengelolaan koperasi dan usaha melalui peningkatan sumber daya manusia 400 (empat ratus) pengurus koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan/ bimbingan teknis;	koperasi aktif yang melaksanakan RAT.						
				8. Meningkatkan jumlah koperasi sehat.	10	20	30	40	50	
				9. Meningkatkan jumlah UMKM binaan.	20	40	60	80	100	
				10. Meningkatkan jumlah wirausaha pemula/ wirausaha baru penerima dana bantuan pemerintah.	50	100	150	200	250	
4.	Memantapkan kelembagaan koperasi sesuai jati diri koperasi		<ul style="list-style-type: none"><li>- Terwujudnya peningkatan jumlah UMKM binaan melalui peningkatan 100 (seratus) jumlah UMKM terdaftar;</li><li>- Peningkatan 50 (lima puluh) usaha mikro yang telah difasilitasi dana bergulir.</li><li>- Penumbuhan 25 (dua puluh lima) koperasi berbadan hukum</li><li>- Peningkatan 250 (dua ratus lima puluh) koperasi aktif yang melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT)</li></ul>							



			- Peningkatan 50 (lima puluh) koperasi sehat						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN 2022

Penyusunan RENJA 2022 berpedoman pada renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2022. Penyusunan RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam rencana kerja (RENJA). Program dan kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur 2022 dapat di lihat pada tabel 3.2 seperti dibawah ini :



URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN		Pagu RKPD
<b>BELANJA PROGRAM</b>		<b>Rp 5.315.178.098</b>
<b>Program</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Rp 3.039.628.098</b>
<b>Kegiatan</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 30.000.000</b>
Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 30.000.000
<b>Kegiatan</b>	<b>Administrasi Keuangann Perangkat Daerah</b>	<b>Rp. 2.346.608.698</b>
Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 2.301.858.698
Sub Kegiatan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verivikasi Keuangan SKPD	Rp 44.750.000
<b>Kegiatan</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 143.205.000</b>
Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp 4.450.000
Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 21.550.000
Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 21.905.000
Sub Kegiatan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 16.000.000
Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 1.800.000
Sub Kegiatan	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 15.000.000
Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 62.500.000
<b>Kegiatan</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Rp 32.214.400</b>
Sub Kegiatan	Pengadaan Meubeler	Rp 32.214.400



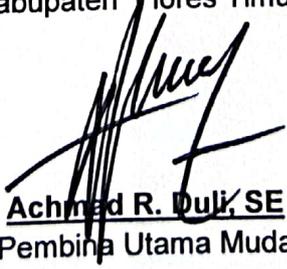
Kegiatan	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Rp	<b>450.600.000</b>
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	1.500.000
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	35.000.000
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	414.100.000
Kegiatan	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Rp	<b>37.000.000</b>
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	26.000.000
Sub Kegiatan	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	6.000.000
Sub Kegiatan	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	5.000.000
<b>Program</b>	<b>Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi</b>	Rp	<b>100.000.000</b>
Kegiatan	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		
Sub Kegiatan	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	40.000.000
Sub Kegiatan	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Rp	60.000.000
<b>Program</b>	<b>Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi</b>	Rp	<b>95.000.000</b>
Kegiatan	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		
Sub Kegiatan	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	60.000.000
Sub Kegiatan	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Rp	35.000.000
<b>Program</b>	<b>Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian</b>	Rp	<b>35.000.000</b>
Kegiatan	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota		
Sub Kegiatan	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Rp	35.000.000
<b>Program</b>	<b>Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi</b>	Rp	<b>40.000.000</b>
Kegiatan	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		



Sub Kegiatan	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi	Rp	40.000.000
<b>Program</b>	<b>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)</b>	<b>Rp</b>	<b>255.550.000</b>
Kegiatan	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		
Sub Kegiatan	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Rp	30.000.000
Sub Kegiatan	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Rp	165.550.000
Sub Kegiatan	Pemberdayaan kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Rp	60.000.000
<b>Program</b>	<b>Program Pengembangan UMKM</b>	<b>Rp</b>	<b>1.750.000.000</b>
Kegiatan	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		
Sub Kegiatan	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi		1.750.000.000

Larantuka, 2021

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Kabupaten Flores Timur,

  
Achmad R. Duli, SE

Pembina Utama Muda

19650516 199203 1 008



RENCANA KERJA (RENJA)  
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN FLORES TIMUR

2022

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

PERUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU 2023

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBE R DANA	PN	PD	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2					Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
2-17	0-0	0-0	01		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH								5.846.695.908	
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota								3.343.590.908	
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran (%)</i>	100				PP	100	3.343.590.908	
						<i>Kualitas Sarana Prasarana Aparatur (%)</i>								
						<i>Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja OPD (dokumen)</i>								



RENCANA KERJA (RENJA)  
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN FLORES TIMUR

2022

x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			30.000.000				PP		33.000.000
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya jasa penyusunan laporan (Dokumen)	7	30.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			7	33.000.000
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.346.608.698				PP		2.581.269.568
x	xx	01	2.02	02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan)	14	2.301.858.698		APBD II (DAU)			14	2.532.044.568
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya jasa administrasi keuangan (bulan)	12	44.750.000	Larantuka	APBD II (DAU)			12	49.225.000
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			143.205.000				PP		157.525.500
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (bulan)	AC LG 2 unit	4.450.000	Larantuka	APBD II (DAU)			AC LG 2 unit	4.895.000
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan gedung kantor (Unit)	3 unit (laptop 2 unit, printer 1 unit)	21.550.000	Larantuka	APBD II (DAU)			3 unit (laptop 2 unit, printer 1 unit)	23.705.000
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor (Jenis)	13	4.325.000	Larantuka	APBD II (DAU)			13	4.757.500
						Tersedianya alat tulis kantor (Jenis)	29	17.580.000	Larantuka	APBD II (DAU)			29	19.338.000
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan (lembar)	4000 lembar	16.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			4000 lembar	17.600.000



x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan becaan dan peraturan perundang-undangan (jenis)	2 ( pos kupang dan warta Flobam ora )	1.800.000	Larantuka	APBD II ( DAU )		2 ( pos kupang dan warta Flobam ora )	1.980.000
x	xx	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman (om)	250	15.000.000	Larantuka	APBD II ( DAU )		250	16.500.000
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (kali)	55	62.500.000	Larantuka	APBD II ( DAU )		55	68.750.000
x	xx	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kualitas Sarana Prasarana Aparatur (%)		32.214.400					35.435.840
x	xx	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya meubeler (Unit)	6 unit	32.214.400	Larantuka	APBD II ( DAU )		6 unit	35.435.840
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran (%)		450.600.000					495.660.000
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat (buah)	150	1.500.000	Larantuka	APBD II ( DAU )		150	1.650.000
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik (bulan)	12	35.000.000	Larantuka	APBD II ( DAU )		12	38.500.000
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran (Orang)	36	414.100.000	Larantuka	APBD II ( DAU )		36	455.510.000
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			37.000.000			PP		40.700.000



RENCANA KERJA (KENJA)  
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN FLORES TIMUR

2022

x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang difasilitasi Perizinan (unit)	9	7.500.000	Larantuka	APBD II (DAU)		9	8.250.000
						Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara (unit)	1	18.500.000	Larantuka	APBD II (DAU)		1	20.350.000
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara (Unit Gedung)	1	6.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)		1	6.600.000
x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung kantor (Unit)	12 unit ( laptop 7 unit 6 printer dan AC LG )	5.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)		12 unit ( laptop 7 unit 6 printer dan AC LG )	5.500.000
2	17				<b>Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>			2.275.550.000					2.503.105.000
2	17	03			<b>Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi</b>	<b>Jumlah Koperasi aktif (Koperasi)</b>	500	100.000.000			PP	500	110.000.000
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			100.000.000			PP		110.000.000
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi/ KUD yang dilatih (KUKM)	194	40.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)		194	44.000.000



RENCANA KERJA (RENJA)  
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN FLORES TIMUR

2022

2	17	03	2.01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang diawasi/ diperiksa (Koperasi)	10	60.000.000	KPRI Usaha Jaya, KSP Kopdit Ikama, KPRI Gelekat Nara, KPRI Karykes ( kec. Larantuka ), Ratu Damai, Kopwan Koperasi Indonesia Ina Gelekat, KSU Nusa Bolak, ( Kec. Witihamana ), KSP Kopdit Guru Klubagolit, Kopwan Ina Senaren, KSU Saganara ( Kec. Klubagolit )	APBD II ( DAU )			10	66.000.000
2	17	04			Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi	Jumlah Koperasi aktif (Koperasi)	5	95.000.000				PP	5	104.500.000
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			95.000.000				PP		104.500.000
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/JSP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok sasaran(Koperasi)	40	60.000.000	KPRI 468 Larantuka, KUD Mina Gonsalu Raya, KSP CU Sinar Saron, Prinkop Wredatama, KPRI Usaha Jaya, Kopdit Binawirawan, KPRI Gelekat Nara, Prinkopad, KPRI Sumber Harapan, KPRI Karya Makmur, KPRI Karykes, Prinkoppol 1229, Kopdit Sukma, Kopdit Ortal, Kopdit Ikamala, Kopkar TKBM Larantuka, Kopkarbanuliwo PDAM (kec. larantuka), KSP Wotan Baru, Koptan Tani Nukan Rere, Kopwan Ina Nara Laga Bunga (kec. Adonara Timur), KSU Ratu Damai, Kopwan Indonesia Ina Gelekat, Kopwan S.S Timun Susa, KSU Nusa Bolak ( Kec. Witihamana ), KSP Guru Klubagolit, Kopwan Ina Senaren, KSU Saganara ( kec. klubagolit ), KSP Nuba Lagadoni, Koptan Harapan Jaya ( Kec. Ile Boleng )Kopdit Sandominggo, Koptan Suka Maju (Kecamatan Wulanggitang), Koperasi Produksi Solid Likutuden ( kec. Demon Pagong ), Kopnel Kera Murin, KSP Polis ( kec. Solor Timur ), Kopdit Taras, Koptan Permata laut( Kec. Solor Barat )	APBD II ( DAU )		40	66.000.000	



2	17	04	2.01	02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah kelompok sasaran(Koperasi)	10	35.000.000	10 Koperasi ( KPRI Usaha Jaya - Kec. Larantuka, KSU Ratu Damai-Kec. Wihama,Kopwan Indonesia Ina Gelekat-Kec. Wihama,KSP Kopdit Guru Klubagolit - Kec. Klubagolit,KSP Kopdit Ikama-Kec. Larantuka, Kopwan Ina Senaren-Kec. Klubagolit, KPRI Gelekat Nara-Kec. Larantuka, KPRI Karykes-kec. Larantuka,KSU Saganara-Kec. Klubagolit, KSU Nusa Bolak-Kec. Wihama	APBD II ( DAU )		10	38.500.000
2	17	05			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Jumlah Koperasi aktif (Koperasi)	5	35.000.000			PP	5	38.500.000
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi aktif (Koperasi)		35.000.000			PP		38.500.000
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Sosialisasi, Sinkronisasi, Sarasehan, Lomba Asah terampil	3	35.000.000	Larantuka	APBD II ( DAU )		3	38.500.000
2	17	06			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi			40.000.000			PP		44.000.000
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			40.000.000			PP		44.000.000
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi	Koperasi aktif yang melaksanakan RAT (Koperasi)	40	40.000.000	KPRI 468 Larantuka,KUD Mina Gonsalu Raya,KSP CU Sinar Saron, Prinkop Wredatama,KPRI Usaha Jaya, Kopdit Binawirawan, KPRI Gelekat Nara, Prinkopad, KPRI Sumber Harapan, KPRI Karya Makmur, KPRI Karykes, Prinkoppol 1229,Kopdit Sukma,Kopdit Ortal,Kopdit Ikamala,Kopkar TKBM Larantuka,Kopkarbanuliwo PDAM (kec. larantuka),KSP Wotan Baru,Koptan Tani Nukan Rere,	APBD II ( DAU )		40	44.000.000





2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	UMKM yang dilatih (UMKM)	30	60.000.000	19 Kecamatan	APBD II (DAU)			30	66.000.000
2	17	08			Program Pengembangan UMKM	Jumlah UKM / LKM (UMKM)	100	1.750.000.000				PU	100	1.925.000.000
						Pengembangan wirausaha baru/ wirausaha pemula(wirausaha baru)	500						500	
						UMKM dan Koperasi yang diperkuat sistem pemasaran (UMKM)	30						30	



RENCANA KERJA (RENJA)  
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN FLORES TIMUR

2022

2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			1.750.000.000			PU		1.925.000.000
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Fasilitas Pengembangan UKM (bantuan sarana dan prasarana)	50	750.000.000	19 kecamatan	APBD II (DAU)		50	825.000.000
						Jumlah wirausaha pemula / wirausaha baru (UMKM) > bantuan modal usaha	100	1.000.000.000	19 kecamatan	APBD II (DAU)		100	1.100.000.000

Laratuka, oktober 2021

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Kabupaten Flores Timur,



Achmad R. Dani, S.S.  
Pemula Usaha Muda  
NIP. 19630518 199203 1 008



## BAB. V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022. Renja ini memberikan gambaran mengenai program, kegiatan, sasaran, indikator-indikator kinerja dan target yang akan dilaksanakan dalam anggaran 2022 sehingga pada akhir tahun pelaksanaan anggaran dapat terukur. Seluruh program dan kegiatan yang di rencanakan diharapkan akan bisa menutupi seluruh kebutuhan program dan kegiatan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur dan yang di sesuaikan juga dengan anggaran yang di terima Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur.

Alokasi Anggaran pada tahun 2022 yang di peruntukan untuk membiayai seluruh kegiatan dan program kerja dikelompokkan dalam **Belanja Langsung Non Urusan / Belanja Tidak langsung** sebesar **Rp. 2.301.858.698,00** (dua miliar tiga ratus satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus Sembilan puluh delapan rupiah ) serta **Belanja Langsung Urusan Wajib** sebesar **Rp. 3.013.319.400,00** (tiga miliar tiga belas juta tiga ratus sembilan belas ribu empat ratus rupiah ) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur. Dengan demikian total anggaran seluruhnya untuk **Belanja** sebesar **Rp. 5.315.178.098,00** ( lima miliar tiga ratus lima belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan puluh delapan rupiah ).



Untuk itu, dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RENJA - OPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkewajiban untuk melakukan pemantauan pelaksanaannya.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil  
dan Menengah Kabupaten Flores Timur,



**Achmad R. Duli, SE**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650516 199203 1 008